

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang diinisiasi pemerintah untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan. Implementasi program MBG memiliki prospek strategis dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional yang memerlukan dukungan regulasi yang kuat, tata kelola yang transparan, dan koordinasi hukum antarinstansi yang baik tanpa terkecuali di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan program makan bergizi gratis, memahami prospek implementasi program makan bergizi gratis, dan untuk mencari solusi strategi penguatan implementasi program makan bergizi gratis dalam Sistem Ketahanan Pangan Nasional di Kota Bandung.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statute approach*) dan sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* dengan pendekatan normatif yang didukung data empiris, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengkaji implementasinya dalam praktik di Kota Bandung. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum dan sinkronisasi regulasi kebijakan pangan dan gizi nasional, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial, khususnya dalam pelaksanaan Program MBG di Kota Bandung.

Pengaturan program makan bergizi gratis (MBG) belum sepenuhnya sesuai dengan sistem ketahanan pangan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari dasar hukum, tujuan, dan landasan pelaksanaan kebijakan. Ketahanan pangan secara kelembagaan seharusnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian bukan TNI-POLRI yang terlibat dalam implementasi MBG di Indonesia. Implementasi program makan bergizi gratis dalam rangka penguatan Ketahanan Pangan Nasional di Kota Bandung belum sepenuhnya memiliki prospek yang bagus. Hal tersebut karena masih terdapat celah inefisiensi yang disebabkan ketiadaan regulasi mekanisme kerjasama antara instansi pemerintah, yayasan, dan vendor yang berimplikasi pada korupsi sistemik. Kurangnya prospek MBG di Kota Bandung dalam penguatan ketahanan pangan juga tampak masih minimnya dapur SPPG jika dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat. Strategi penguatan implementasi program MBG di Kota Bandung dapat dilakukan dengan penguatan tata kelola dan koordinasi antar-lembaga; optimalisasi rantai pasok dan pemanfaatan pangan lokal; dan peningkatan kapasitas SDM serta pelayanan SPPG.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, SPPG